

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rate of economic growth adalah salah satu metrik yang paling penting untuk mengevaluasi kemajuan ekonomi sebuah negara (Yanti & Murtala, 2019). Kecepatan pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator paling penting dari perkembangan ekonomi suatu negara, untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu sistem perekonomian (Saibana *et al.*, 2024). Stabilitas pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, kemakmuran, serta pemerataan pendapatan. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai indikator yang mencerminkan perkembangan perekonomian yang merata, baik di tingkat nasional maupun daerah (Husin, 2022). Jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh suatu negara dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (Simanungkalit, 2020). Menurut BPS (2023), Produk Domestik Bruto (PDB) berfungsi dalam berbagai aspek, antara lain untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu negara, memahami komposisi perekonomian, serta sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan utama yang harus menjadi fokus perhatian negara dan dicapai setiap tahunnya. Salah satu ukuran keberhasilan suatu negara adalah tingkat pertumbuhan ekonomi negaranya, ini

juga merupakan salah satu fokus utama dalam konsentrasi pembangunan di Indonesia (Maulana *et al.*, 2022).



Gambar 1. 1 Grafik PDRB Kota Bekasi 2013-2024

Sumber : BPS, 2024

Dalam skala wilayah yang lebih kecil, pertumbuhan ekonomi pada tingkat makroekonomi daerah dapat dievaluasi melalui peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) (Hakib, 2019). Berdasarkan grafik PDRB Kota Bekasi untuk periode 2013–2023 diatas, menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan, baik dalam konteks harga berlaku maupun harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp57,71 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp118,96 triliun pada tahun 2023, yang mencerminkan stabilitas pertumbuhan ekonomi nominal selama sepuluh tahun terakhir. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, fluktuasi

harga pasar, serta perkembangan aktivitas ekonomi yang semakin pesat. Di sisi lain, PDRB berdasarkan harga konstan, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil dengan mengesampingkan dampak inflasi, juga menunjukkan peningkatan dari Rp49,74 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp77,24 triliun pada tahun 2023. Meskipun laju pertumbuhannya lebih moderat dibandingkan dengan harga berlaku, tren ini tetap mencerminkan adanya pertumbuhan volume ekonomi yang sehat di Kota Bekasi.

Pada tahun 2020, PDRB Kota Bekasi mengalami stagnasi atau sedikit penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya dampak Covid-19, yang telah menjadi tantangan global serta berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia (Hidayat *et al.*, 2021). Namun, setelah tahun tersebut, terjadi pemulihan yang konsisten, terutama pada PDRB berdasarkan harga berlaku, yang kembali menunjukkan peningkatan hingga tahun 2023. Menurut Ukhti *et al.* (2020), salah satu isu yang kerap dihadapi dalam perkembangan ekonomi adalah ketidakmerataan antar wilayah, di mana suatu daerah dapat mengalami kemajuan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Kondisi ini mencerminkan fenomena yang tengah berlangsung di Kota Bekasi, di mana kota ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Kota Bekasi bahkan dinyatakan sebagai kota terkaya di Jawa Barat belakangan ini.

Tabel 1. 1 Data PDRB Kota Bekasi

Data PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bekasi				
Tahun 2012-2023				
Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan	
2012	Rp	51.699.220.000.000	Rp	46.907.330.000.000
2013	Rp	57.715.000.000.000	Rp	49.741.130.000.000
2014	Rp	64.109.360.000.000	Rp	52.534.090.000.000
2015	Rp	70.765.230.000.000	Rp	55.456.070.000.000
2016	Rp	76.908.850.000.000	Rp	58.831.080.000.000
2017	Rp	83.327.640.000.000	Rp	62.202.010.000.000
2018	Rp	90.980.620.000.000	Rp	65.845.090.000.000
2019	Rp	98.107.690.000.000	Rp	69.406.530.000.000
2020	Rp	96.492.280.000.000	Rp	67.619.240.000.000
2021	Rp	101.383.360.000.000	Rp	69.796.930.000.000
2022	Rp	109.881.370.000.000	Rp	73.260.650.000.000
2023	Rp	118.963.020.000.000	Rp	77.241.780.000.000

Sumber : BPS, 2024

Data diatas merupakan data PDRB berdasarkan pengeluaran Kota Bekasi. PDRB adalah salah satu indikator ekonomi yang berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi performa pembangunan ekonomi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, baik berdasarkan harga yang berlaku maupun harga yang konstan (Ukhti *et al.*, 2020). Dapat dilihat bahwa memang tingkat pertumbuhan di Kota Bekasi mengalami kenaikan yang signifikan, baik dari sisi harga berlaku maupun

harga konstannya. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.

Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi laju perkembangannya, di antaranya inflasi dan tingkat konsumsi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan harga secara keseluruhan yang berlangsung secara berkelanjutan (Salsabilla, 2023). Dalam konteks ekonomi makro, inflasi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai stabilitas perekonomian suatu negara. Inflasi dianggap sebagai salah satu elemen kunci yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Simanungkalit, 2020). Menurut Sri Kartini (2019), suatu negara yang menghadapi inflasi dipastikan akan mengalami hambatan dalam aktivitas ekonominya. Terdapat kenaikan umum dan berkelanjutan dalam biaya barang dan jasa selama periode waktu tertentu yang dikenal sebagai inflasi. Ini adalah fenomena yang menarik perhatian utama karena inflasi yang tidak terkontrol dapat mengganggu stabilitas ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, serta menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan investasi dan konsumsi (Desfitra *et al.*, 2020). Setiap negara menetapkan ambang batas inflasi yang bervariasi, yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi yang berlaku di negara tersebut, termasuk Indonesia. Ambang batas inflasi merujuk pada tingkat inflasi tertinggi yang masih dianggap wajar dalam suatu perekonomian, sebelum menimbulkan efek negatif yang lebih signifikan terhadap ekonomi tersebut (Hasdiana *et al.*, 2023).

Sejalan dengan fenomena yang sedang terjadi di Kota Bekasi, Ratu Purnama *et al.* (2022), menyatakan bahwa variabel inflasi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar, sementara konsumsi rumah tangga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Adapun menurut Almaya *et al.* (2021), menyatakan bahwa inflasi memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 1. 2 Data IHK Kota Bekasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Bekasi Tahun 2012-2023	
Tahun	IHK
2012	130,72
2013	140,79
2014	112,16
2015	118,30
2016	121,27
2017	125,48
2018	130,23
2019	135,50
2020	106,73
2021	108,75
2022	113,13
2023	117,34

Sumber : BPS, 2024

Sebuah indeks yang dikenal dengan IHK digunakan untuk menghitung rata-rata biaya barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Indeks ini sering digunakan untuk menganalisis tingkat inflasi di suatu negara serta sebagai acuan dalam penyesuaian upah, gaji, dana pensiun, dan berbagai

jenis kontrak lainnya. Indeks harga konsumen ini dapat mengukur fluktuasi harga produk secara rata-rata dan berkala saat konsumen melakukan pembelian barang dan jasa. Perubahan harga ini biasanya disebut inflasi jika terjadi kenaikan, dan deflasi jika terjadi penurunan (Nasarudin, 2023). Dari data yang disajikan, terlihat bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Bekasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingginya tingkat IHK mencerminkan adanya peningkatan harga barang dan jasa secara keseluruhan, yang berpotensi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

Ketidakseimbangan dalam pola konsumsi atau konsumsi yang tidak berkelanjutan juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Saibana *et al.*, 2024). Konsumsi atau yang dalam bahasa Inggris disebut *consumption*, merujuk pada pemakaian, penggunaan, pemanfaatan, dan pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup demi mencapai kepuasan. Dalam konteks ekonomi makro, konsumsi dilambangkan dengan huruf C sebagai salah satu variabel (Husin, 2022). Sementara itu, rumah tangga dapat diartikan sebagai entitas yang menggunakan barang atau jasa serta memiliki faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, kekayaan, dan kewirausahaan (Zulkarnain & Murwiati, 2023). Pengeluaran konsumsi rumah tangga merujuk pada total nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk pengadaan barang dan pelayanan yang diperlukan dalam periode satu tahun. Dalam konteks analisis makro ekonomi, istilah ini lebih umum dikenal sebagai konsumsi rumah tangga (Hutagaol *et al.*, 2024). Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong utama dalam peningkatan pengeluaran

konsumsi rumah tangga. Namun, di sisi lain pertumbuhan pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga juga turut berkontribusi terhadap fenomena ini (Padli *et al.*, 2020). Peningkatan konsumsi rumah tangga ini pula yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (H. H. Putra, 2022).

Tabel 1. 3 Data Konsumsi Rumah Tangga Kota Bekasi

Data Konsumsi Rumah Tangga Kota Bekasi			
Tahun 2012-2023			
Tahun	Harga Berlaku		Harga Konstan
2012	Rp	63.112.620.000.000	Rp 58.241.530.000.000
2013	Rp	68.957.920.000.000	Rp 60.212.080.000.000
2014	Rp	75.473.090.000.000	Rp 62.040.160.000.000
2015	Rp	83.053.150.000.000	Rp 64.780.720.000.000
2016	Rp	89.090.940.000.000	Rp 68.299.960.000.000
2017	Rp	95.332.880.000.000	Rp 71.417.170.000.000
2018	Rp	103.121.620.000.000	Rp 74.387.920.000.000
2019	Rp	110.686.270.000.000	Rp 77.285.880.000.000
2020	Rp	109.145.580.000.000	Rp 74.734.610.000.000
2021	Rp	112.770.630.000.000	Rp 76.101.190.000.000
2022	Rp	121.706.690.000.000	Rp 79.231.540.000.000
2023	Rp	130.955.100.000.000	Rp 82.154.930.000.000

Sumber : BPS, 2024

Pengeluaran konsumsi merujuk pada pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran ini meliputi barang dan jasa yang diperoleh melalui pembelian, pemberian, atau hasil dari usaha mandiri (BPS, 2023). Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, konsumsi berdasarkan harga berlaku di Kota Bekasi hanya sebesar Rp. 63.112.620.000.000 saja.

Selanjutnya selama periode tersebut hingga 2019, konsumsi terus mengalami peningkatan. Namun, terjadi penurunan konsumsi sebesar Rp. 1.540.690.000.000 pada 2020. Penurunan ini diasumsikan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan menurunnya tingkat konsumsi di Kota Bekasi. Namun, di tahun-tahun berikutnya konsumsi di Kota Bekasi kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Selain konsumsi rumah tangga dan inflasi, pengeluaran pemerintah juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah adalah keputusan strategis yang diambil oleh negara untuk menyediakan barang dan jasa publik, serta mencerminkan penggunaan sumber daya nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Hutagaol *et al.*, 2024). Pengeluaran pemerintah memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang infrastruktur fisik dan sumber daya manusia (Kharazi & Nuraini, 2024). Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mengelola ekonomi dengan cara menganalisis dan menetapkan besaran penerimaan serta pengeluaran pemerintah dalam setiap periode, sesuai dengan total anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Husin, 2022). Pengeluaran pemerintah sering kali mencerminkan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan anggaran. Bersamaan dengan meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam ekonomi, pengeluaran ini terus mengalami perkembangan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah (Putra, 2022). Peningkatan pengeluaran pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Artinya pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Namun, ketika kondisi ekonomi membaik, konsumsi masyarakat akan cenderung meningkat. Di sisi lain, keterbatasan sumber produksi dapat menyebabkan kenaikan harga barang, yang pada gilirannya memicu inflasi. Ini merupakan eksternalitas negatif yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan berpotensi mengakibatkan penurunan dalam pertumbuhan ekonomi (Simatupang, 2021).

Kota Bekasi memang memiliki alokasi anggaran yang cukup besar, tetapi seringkali efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut tidak mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sabyan *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa secara parsial hanya variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga yang secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Namun, pengeluaran pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga bersama-sama secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Adapun menurut Riani, 2023, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah secara positif dan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Tabel 1. 4 Data Pengeluaran Pemerintah Kota Bekasi

Data Pengeluaran Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013-2023 (Dalam Rupiah)			
Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	3.026.040.000.000	2.959.889.995.000	97,8%
2014	3.749.230.000.000	3.107.838.415.650	82,9%
2015	4.188.660.000.000	3.882.237.460.460	92,7%
2016	4.668.010.000.000	4.409.521.098.530	94,5%
2017	5.709.432.093.083	4.982.347.106.794	87,3%
2018	5.747.421.232.707	5.001.748.526.414	87,0%
2019	7.069.408.614.460	5.567.923.376.279	78,8%
2020	5.759.332.487.561	4.787.480.133.190	83,1%
2021	6.449.614.890.862	5.704.885.462.982	88,5%
2022	6.674.930.904.273	5.719.816.481.557	85,7%
2023	7.211.545.860.149	6.411.452.063.828	88,9%

Sumber : Transparansi Anggaran Bekasi Kota (2024)

Data pengeluaran pemerintah Kota Bekasi antara tahun 2013 hingga 2023 menunjukkan bahwa anggaran yang direncanakan cenderung meningkat setiap tahunnya, mulai dari Rp3,02 triliun pada 2013 hingga mencapai Rp7,21 triliun pada 2023. Meskipun anggaran terus meningkat, persentase realisasi pengeluaran tidak selalu mencapai target 100%. Rata-rata persentase realisasi selama periode tersebut sekitar 88%, dengan angka terendah pada tahun 2019 yang hanya mencapai 78,8%. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan di lapangan. Selisih antara anggaran dan realisasi ini, menunjukkan potensi pemborosan atau ketidakmampuan dalam mencapai sasaran perencanaan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar perencanaan anggaran dilakukan lebih realistis, efisiensi dalam pelaksanaan proyek ditingkatkan, serta sistem monitoring dan

evaluasi yang lebih ketat diterapkan. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan anggaran dapat lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi serta menciptakan efek yang multiplier dalam perekonomian (Wahyudi, 2020). Dapat diartikan bahwa, pengeluaran pemerintah yang tidak dapat direalisasikan atau diserap secara optimal dapat menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah studi telah dilakukan di berbagai kota di Indonesia terkait dengan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum ada studi yang secara khusus mengkaji hubungan langsung antara peningkatan PDRB Kota Bekasi dan dampaknya terhadap inflasi, konsumsi rumah tangga, serta pengeluaran pemerintah di daerah tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis mengenai interaksi ketiga variabel ini dalam konteks pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi, yang akan dituangkan dalam skripsi berjudul **“Analisis Pengaruh Inflasi, Konsumsi Rumah Tangga, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus di Kota Bekasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diajukan beberapa masalah untuk penelitian dan penulisan skripsi ini.

1. Bagaimana pengaruh inflasi yang diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi?
2. Bagaimana pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD Kota Bekasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi?
4. Apakah inflasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah secara simultan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh inflasi yang diukur berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.
2. Untuk menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam APBD Kota Bekasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.
4. Untuk menganalisis seberapa besar inflasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah secara simultan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi, khususnya dalam menganalisis interaksi antara inflasi, konsumsi rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk merumuskan kerangka teoritis yang lebih mendalam dalam kajian ekonomi regional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi daerah yang lebih efisien. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga inflasi dalam batas yang terkendali, melakukan konsumsi yang bijak, serta memahami peran pengeluaran pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi yang bermanfaat bagi akademisi dan peneliti lain di bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Manfaat Empiris

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memahami kondisi ekonomi Kota Bekasi secara nyata. Selain itu, data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan

sebagai alat evaluasi oleh pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Penelitian ini diurutkan dengan sistematika yang terdiri dari 5 bab.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang pemilihan topik penelitian, serta menguraikan konteks dan urgensi dari penelitian tersebut. Di dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang memberikan gambaran singkat mengenai isi penelitian.

BAB 2 TELAAH PUSTAKA

Bab ini menyajikan telaah teoritis yang membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan variabel penelitian, serta telaah empiris yang mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka konseptual yang menunjukkan hubungan antar variabel dan hipotesis yang berisi pernyataan sementara mengenai hubungan yang akan diuji.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, jenis serta sumber data (primer atau sekunder), definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis

data dan pengujian hipotesis yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji asumsi yang telah ditetapkan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah diperoleh, disertai dengan pembahasan yang mengaitkan hasil tersebut dengan teori dan temuan sebelumnya, serta menjelaskan implikasi dan makna dari hasil tersebut secara mendetail.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini menyimpulkan penelitian dengan merangkum temuan utama, membahas keterbatasan penelitian, dan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya atau pihak-pihak terkait, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

